

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### 1. A. Telaah Pustaka

##### 1. Pengertian Akuntansi

Menurut Sukrisno Agoes (2010 : 2) Akuntansi adalah :

Sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Menurut Abdul Halim (2001 : 5) Akuntansi adalah :

Suatu kegiatan jasa, fungsinya untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomidalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan. Akuntansi meliputi beberapa cabang antara lain : akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi pemerintahan.

Sedangkan jika ditinjau dari sudut bidang studi Menurut Ihyaul Ulum MD (2004:2) akuntansi dapat diartikan sebagai berikut :

Akuntansi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kualitatif suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa informasi akuntansi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dengan cara mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk laporan keuangan.

Bidang akuntansi secara keseluruhan dapat dikelompokkan kedalam tiga bagian yaitu :

a. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah dan lembaga yang tidak bertujuan mencari laba.

b. Akuntansi Nasional

Akuntansi nasional adalah akuntansi sosial atau biasa disebut akuntansi makro adalah akuntansi yang khusus ditetapkan oleh lembaga dalam arti makro akuntansi.

c. Akuntansi Perusahaan

Akuntansi perusahaan disebut juga akuntansi yang komersial adalah bidang akuntansi yang bertujuan mencari laba (*profit oriented*) secara rinci akuntansi perusahaan dapat dibedakan menjadi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen lebih ditujukan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi pengelola perusahaan.

Dari beberapa pengertian akuntansi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi adalah dasar pengambilan keputusan ekonomi dengan

cara mencatat, menggolongkan, mengiktisarkan transaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk Laporan Keuangan.

## **2. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Halim (2012: 40)

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi).

Menurut Ihyaul Ulum MD (2004 : 91)

Akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengakuan, pencatatan, dan laporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan, dan menggunakan sistem pencatatan dasar akuntansi tertentu.

Dari beberapa pengertian Akuntansi Keuangan Daerah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Keuangan Daerah adalah: mengacu pada kegiatan administrasi atau pengurusan keuangan daerah, serta mengacu kepada kegiatan penyediaan informasi dalam bentuk Laporan Keuangan bagi pihak eksternal dari Pemerintah Daerah.

### 3. Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Halim, (2012: 84) ada empat prosedur akuntansi yaitu:

Akuntansi Penerimaan Kas, Akuntansi Pengeluaran Kas, Akuntansi selain kas, dan Akuntansi aset.

Menurut Permendagri terdapat 5 prosedur sistem akuntansi keuangan daerah, yang meliputi sebagai berikut:

#### 1) Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD dan/atau SKPKD.

#### 1. Fungsi terkait

Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD, sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.



2. Dokumen yang digunakan
  - a. Surat keterangan pajak daerah, digunakan untuk menetapkan pajak daerah atas wajib pajak yang dibuat oleh PPKD.
  - b. Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD), digunakan untuk menetapkan retribusi daerah atas wajib retribusi yang dibuat oleh pengguna anggaran.
  - c. Surat Tanda Bukti Penerimaan (STBP), digunakan untuk mencatat setiap penerimaan pembayaran dari pihak ketiga yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan.
  - d. Surat Tanda Setoran (STS), digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada SKPD.
  - e. Bukti Transfer, merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah.
  - f. Nota kredit bank, dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas.
  - g. Bukti jurnal penerimaan kas, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan penerimaan kas.
  - h. Buku besar, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk memosting semua transaksi atau kejadian selain kas dari jurnal penerimaan kas ke buku besar untuk setiap rekening aset, kewajiban ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

i. Buku besar pembantu, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat semua transaksi atau kejadian yang berisi rincian akun buku besar untuk setiap rekening yang dianggap perlu.

3. Laporan yang dihasilkan pada SKPD, terdiri atas:

- 1.) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2.) Neraca
- 3.) Laporan Operasional (LO)
- 4.) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 5.) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

pada SKPKD, terdiri atas:

- 1.) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2.) Neraca
- 3.) Laporan Operasional (LO)
- 4.) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 5.) Laporan Arus Kas
- 6.) Laporan Perubahan Saldo
- 7.) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

## 2) **Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas**

Prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD.

### **3) Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah**

Prosedur akuntansi aset adalah serangkaian proses, baik manual maupun komputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitas, penghapusan, pemindah tangan, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai/digunakan SKPD atau SKPKD. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD atau SKPKD.

### **4) Prosedur Akuntansi Selain Kas**

Prosedur akuntansi selain kas adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

### **5) Penyajian Laporan Keuangan**

Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.

## **4. Peranan Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Halim (2012: 53) kelangsungan hidup suatu lembaga sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk meningkatkan kualitas kinerja dari instansi atau lembaga tersebut. Dimana kualitas atau hasil dari kinerja lembaga tersebut memerlukan strategi yang dapat memanfaatkan semua kekuatan dan peluang yang ada, serta menutup kelemahan dan

menetralisasi hambatan strategis dalam dinamika masalah yang akan dihadapi. Semua itu dapat dilakukan apabila manajemen atau pimpinan mampu melakukan pengambilan keputusan yang didasarkan pada masukan-masukan yang objektif.

Di antara sekian banyak faktor yang menjadi masukan pimpinan dalam pengambilan keputusan adalah masukan yang berasal dari sistem akuntansi keuangan daerah. Akuntansi itu sendiri sebagai suatu sistem informasi yang mencakup kegiatan mengidentifikasi, menghimpun, memproses, dan mengomunikasikan informasi ekonomi mengenai suatu organisasi ke berbagai pihak.

#### **5. Tujuan Akuntansi Keuangan Daerah**

Tujuan akuntansi keuangan daerah, *American Accounting Association* dalam buku Indra Bastian (2001:165) menyatakan bahwa tujuan akuntansi keuangan daerah yaitu:

- a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercaya kepada organisasi.
- b. Memberikan informasi yang memungkinkan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan pengguna sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah dan penggunaan dana publik.



## 6. Perbedaan Akuntansi Keuangan Daerah dengan Akuntansi Perusahaan

Menurut Muhammad Gede (2000:28) menyebutkan perbedaan antara akuntansi keuangan daerah dengan akuntansi perusahaan atau swasta sebagai berikut:

- a. Perbedaan yang utama antara akuntansi keuangan daerah dengan akuntansi perusahaan yaitu terletak pada kegiatan-kegiatan pemerintah pada umumnya tidak ditujukan untuk mencari laba sebagaimana halnya pada kegiatan-kegiatan perusahaan.
- b. Pemerintah memberikan pelayanan untuk kepentingan keamanan, kesejahteraan dan manfaat-manfaat umum lainnya kepada seluruhnya masyarakat, sedangkan perusahaan menjual barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan.
- c. Para penyumbang dana kepada pemerintah seperti wajib pajak tidak bertindak secara sukarela, mengharapkan agar dana yang diberikan diurus dengan efektif, efisien dan ekonomis sedangkan para pemberi modal pada perusahaan adalah secara sukarela untuk ikut dalam perniagaan yang mengharapkan sesuatu keuntungan langsung.
- d. Akuntansi pemerintah bersifat kaku dengan banyak peraturan-peraturan yang mengaturnya, sedangkan akuntansi perusahaan bersifat fleksibel.
- e. Akuntansi pemerintah tidak menyusun perhitungan rugi laba seperti yang dilakukan pada akuntansi perusahaan.
- f. Akuntansi pemerintah tidak membuat pemilikan pribadi seperti dibuat pada akuntansi perusahaan.

g. Pada akuntansi pemerintah tidak melaksanakan perkiraan penyusutan aktiva, sedangkan pada akuntansi perusahaan hal ini merupakan suatu keharusan.

Anggaran tahunan pemerintah merupakan rencana operasi keuangan yang harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif. Jumlah anggaran pemerintah tersebut merupakan batas maksimal yang wajib ditaati oleh pemerintah, sedangkan pada perusahaan juga dibuat anggaran perusahaan tahunan dan dilaksanakan oleh direksi yang akan dipertanggungjawabkan dihadapan rapat umum pemegang saham.

## **7. Pencatatan Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Abdul Halim (2004:34) ada beberapa macam pencatatan yang digunakan, yaitu:

### **1. Single Entry**

Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi Penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi Pengeluaran.

### **2. Double Entry**

Sistem pencatatan double entry sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali (double = berpasangan/ganda, entry = pencatatan). Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam

pencatatan tersebut ada sisi Debit dan Kredit. Sisi Debit ada di sebelah Kiri sedangkan sisi Kredit ada di sebelah Kanan.

Dalam melakukan pencatatan tersebut, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencatatan ini. Persamaan dasar akuntansi tersebut berbentuk sebagai berikut:

$$\text{AKTIVA} + \text{BELANJA} = \text{UTANG} + \text{EKUITAS DANA} + \text{PENDAPATAN}$$

Suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aktiva akan dicatat pada sisi Debit sedangkan yang berakibat berkurangnya aktiva akan dicatat pada sisi Kredit. Hal yang sama dilakukan untuk belanja.

Hal yang sebaliknya dilakukan untuk utang, ekuitas dana, dan pendapatan. Apabila suatu transaksi mengakibatkan bertambahnya utang, maka pencatatan akan dilakukan pada sisi Kredit, sedangkan jika mengakibatkan berkurangnya utang, maka pencatatan dilakukan pada sisi Debit. Hal serupa ini dilakukan untuk ekuitas dana dan pendapatan.

### 3. Triple Entry

Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, satuan pemegang kas pada satuan kerja maupun pada bagian keuangan atau badan/biro pengelola kekayaan daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran.

## 8. Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah

Dasar pengakuan (*recognition*) adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat digunakan berbagai sistem atau basis atau dasar akuntansi.

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012 : 5-55) dasar akuntansi terbagi 4, yaitu :

- a. Basis Kas (*cash basis*)  
Basis kas, seperti telah diuraikan sebelumnya menetapkan bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas, apabila suatu transaksi bukan menimbulkan perubahan kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat.
- b. Basis Akrual (*accrual basis*)  
Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa itu terjadi dan bukan hanya saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam pelaporan keuangan pada periode terjadinya.
- c. Basis Kas Modifikasian (*modified cash basis*)  
Basis kas modifikasian mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada tahun anggaran berdasarkan basis akrual.
- d. Basis Akrual Modifikasian (*modified accrual basis*)  
Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan.




## 9. Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Bastian (2007:76) dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi Sektor Publik, mengatakan bahwa: “Siklus akuntansi merupakan sistematika



pencatatan transaksi keuangan, peringkasan dan pelaporan keuangan.”. Alur siklus akuntansi dapat dikelompokkan dalam tiga tahap yaitu :

Gambar II.1.  
Alur Siklus Akuntansi

|  |   |
|--|---|
|  <p>1<br/>Tahap<br/>Pencatatan</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan</li> <li>● Kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku harian atau jurnal</li> <li>● Memindahbukukan ( posting ) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar</li> </ul>   |
|  <p>2<br/>Tahap<br/>Pengikhtisaran</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Penyusunan Neraca saldo ( trial balance ) berdasarkan akun – akun buku besar</li> <li>● Pembuatan ayat jurnal penyesuaian</li> <li>● Penyusunan kertas kerja ( worksheet ) atau neraca lajur</li> <li>● Pembuatan ayat jurnal penutup ( closing entries )</li> <li>● Pembuatan neraca saldo setelah penutupan</li> <li>● Pembuatan ayat jurnal pembalik</li> </ul> |
|  <p>3<br/>Tahap<br/>Pelaporan</p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Laporan Kinerja / Surplus Defisit</li> <li>● Laporan Arus Kas</li> <li>● Laporan Perubahan Ekuitas</li> <li>● Neraca</li> <li>● Catatan Atas Laporan Keuangan</li> </ul>   |

Sumber : Bastian (2007 ; 77)

Urutan siklus akuntansi menunjukkan posisi strategis dari Chart of account. Untuk dapat menyediakan data, setiap transaksi perlu diklasifikasikan, diringkas dan kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Mulai dari kegiatan pencatatan sampai dengan penyajian disebut proses akuntansi.

Beberapa kegiatan dalam Proses Akuntansi :

1. Pencatatan dan Penggolongan

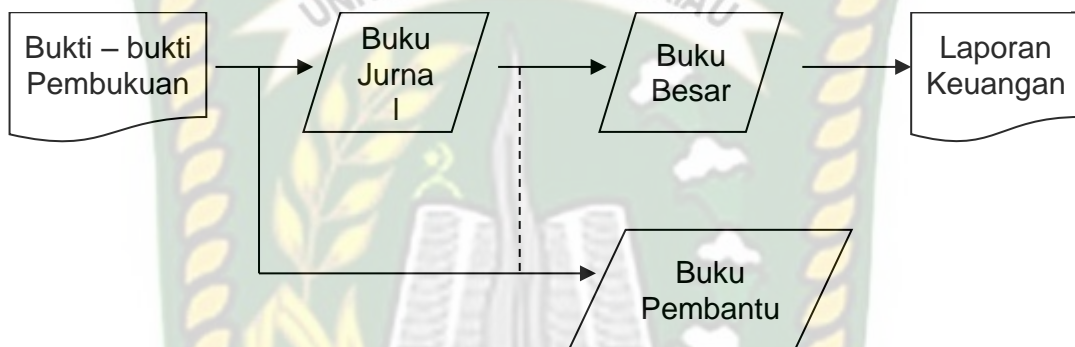
Bukti – Bukti Pembukuan dicatat dalam buku jurnal. Transaksi – transaksi yang sama yang sering terjadi dicatat dalam buku jurnal khusus.

2. Peringkasan / Pengikhtisaran

Transaksi – transaksi yang sudah dicatat dan digolongkan dalam buku jurnal, setiap bulan atau periode tertentu diringkas dan dibukukan dalam rekening –rekening buku besar.

### 3. Penyajian / Pelaporan

Proses Akuntansi dapat digambarkan sebagai berikut (Bastian , 2007 : 78)



Sistem Akuntansi yang baik

dapat memastikan berjalannya proses penyusunan laporan keuangan, seperti :

- a. Bukti – bukti pembukuan, yang merupakan catatan pertama dari setiap transaksi dan digunakan sebagai dasar pencatatan dalam buku jurnal
- b. Buku – buku jurnal, sering disebut dengan buku catatan pertama, merupakan buku yang digunakan untuk mencatat transaksi – transaksi sesuai dengan tanggal terjadinya ( kronologis ), dan sumber pencatatannya berasal dari bukti–bukti pembukuan. Apabila suatu transaksi yang sama sering terjadi, biasanya dibuatkan buku jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat suatu jenis transaksi tertentu seperti jurnal pengeluaran kas, penerimaan kas dan lain–lain.

Rekening riel adalah rekening–rekening aktiva, kewajiban dan ekuitas yang merupakan pos-pos neraca , sehingga rekening-rekening riel itu merupakan rekening-rekening neraca.

Rekening nominal adalah rekening–rekening pendapatan, biaya dan surplus/defisit yang merupakan pos-pos dalam laporan surplus/defisit, sehingga rekening-rekening nominal itu merupakan rekening surplus/defisit.

Rekening Campuran adalah rekening-rekening yang saldonya mengandung unsur-unsur rekening riel dan nominal. Setiap akhir periode rekening-rekening campuran ini perlu dianalisis dan dipisahkan menjadi rekening riel dan nominal.

Gambar II.2.  
Proses Siklus Akuntansi



Sumber : Bastian (2007)

Siklus akuntansi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari :

#### 1. Transaksi

Transaksi merupakan kegiatan yang merubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya, data/bukti/dokumen pendukung disediakan dalam kegiatan operasi suatu entitas.

#### 2. Bukti Transaksi

Bukti-bukti transaksi yang sudah disesuaikan dengan permendagri adalah sebagai berikut :

- a. Bukti transaksi dalam prosedur akuntansi keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah.
- b. Bukti transaksi dalam prosedur akuntansi keuangan daerah pada satuan kerja pengelolaan keuangan daerah.

#### 3. Neraca Awal/Neraca untuk pertama kali

Neraca untuk pertama kali berisi saldo rekening-rekening aktiva dan pasiva yang berasal dari periode sebelumnya, maka neraca untuk pertama kali disusun berdasarkan penilaian aktiva dan pemeriksaan fisik terhadap rekening-rekening yang ada.

#### 4. Jurnal

Jurnal merupakan suatu media/metode yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan. Transaksi yang tidak mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran kas dicatat didalam jurnal umum. Transaksi yang mengakibatkan penerimaan kas dicatat dalam jurnal untuk penerimaan kas, sedangkan transaksi yang mengakibatkan pengeluaran kas dicatat dalam jurnal pengeluaran kas.



5. Buku Besar

Buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan rekening atau perkiraan yang telah dicatat dalam jurnal, rekening-rekening tersebut digunakan untuk mencatat aktiva, kewajiban, atau utang, dan ekuitas secara terpisah.

6. Buku Besar Pembantu

Buku besar pembantu digunakan untuk mencatat rincian rekening tertentu yang ada di buku besar. Rekening-rekening dalam buku besar yang umumnya memerlukan buku besar pembantu adalah : piutang, persediaan, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan utang.

7. Daftar Saldo

Daftar saldo merupakan rekening beserta saldo yang menyertainya pada periode tertentu.

8. Kertas Kerja

Kertas kerja merupakan kolom-kolom yang digunakan dalam proses akuntansi keuangan manual, kertas kerja dibedakan untuk laporan triwulan dan laporan tahunan.

9. Jurnal penyesuaian

Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir priode anggaran atau pada saat laporan keuangan akan disusun guna menghasilkan pengukuran yang tepat antara pendapatan dan belanja/biaya. Penyesuaian dilakukan ketika terdapat transaksi yang mempengaruhi pendapatan dan belanja/biaya lebih dari satu periode anggaran.

10. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu.

b. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan pemerintah daerah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.

c. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan Atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan.

## 11. Jurnal Penutup

Jurnal penutup merupakan langkah yang dibutuhkan dalam siklus akuntansi, langkah ini dilakukan setelah laporan keuangan disusun. Jurnal penutup biasanya dilakukan hanya pada akhir periode anggaran tahunan. Penutupan ini akan menyebabkan saldo dari rekening pendapatan dan belanja/biaya menjadi nol (0) sehingga rekening-rekening tersebut siap kembali menerima data akuntansi periode berikutnya.

## 10. Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah didalam Akuntansi

Abdul Halim (2004 :49) akuntansi merupakan suatu disiplin ilmu sehingga akuntansi memiliki lingkup yang luas. Oleh karena itu, akuntansi dibagi menjadi beberapa bidang berdasarkan pokok bahasan yang dikaji. Apabila pokok bahasan yang dikaji adalah entitas penyusunan laporan keuangan, maka akuntansi terbagi menjadi akuntansi sektor privat dan akuntansi sektor publik atau terbagi menjadi akuntansi komersial, akuntansi pemerintahan (sektor publik) dan sosial.

Apabila pokok bahasan yang dikaji adalah pengguna informasi akuntansi, maka akuntansi terbagi menjadi akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Dalam sistematika ilmu akuntansi, dalam klasifikasi pertama kedudukan akuntansi keuangan daerah adalah dalam akuntansi sektor publik atau dalam akuntansi pemerintahan. Sedangkan dalam klasifikasi kedua, akuntansi keuangan daerah tergolong dalam akuntansi keuangan.

## 11. Tujuan dan Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah

Abdul Halim (2012 : 42) salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat

sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang andal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang.

Abdul Halim (2004 : 34) menyebutkan bahwa pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang berkepentingan terhadap pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung tersebut disebut *Stakeholders* yang meliputi:

- a. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)  
Adalah badan yang memberikan otorisasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan daerah.
- b. BPK (Badan Pengawas Keuangan)  
Adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang termasuk dalam badan ini adalah: Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- c. Investor, Kreditor, dan Donatur  
Badan atau organisasi baik pemerintahan, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi Pemerintah Daerah.
- d. Analisis ekonomi dan pemerhati Pemerintah Daerah  
Yaitu pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan Pemerintah Daerah, seperti: Lembaga pendidikan (termasuk



perguruan tinggi termasuk akademisnya), ilmuwan, peneliti, konsultan, LSM, dan lain-lain.

e. Rakyat

Rakyat disini adalah kelompok masyarakat yang perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan Pemerintah Daerah atau yang menerima produk atau jasa dari Pemerintah Daerah.

f. Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat memerlukan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk menilai pertanggungjawaban Gubernur sebagai wakil pemerintah (Pasal 2 PP No. 108/2000).

g. Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kota, dan Provinsi)

Pemerintah daerah saling berkepentingan secara ekonomi misalnya dalam hal melakukan pinjaman.

## 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

Peraturan Menteri ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: kebijakan akuntansi pelaporan keuangan, dan kebijakan akuntansi akun.

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai

dengan PSAP atas: pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP dan pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. Panduan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### **B. Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah dikemukakan diatas, maka hipotesa dalam penelitian ini adalah: Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.